

KABUR SAAT DIGEREBEK DI HOTEL

Oknum Kades di Lebak Diduga Ngamar Bareng Istri Orang

LEBAK (IM) - Oknum Kepala Desa (Kades) asal Kabupaten Lebak berhasil kabur saat digerebek di sebuah hotel di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Penggerebekan dilakukan karena oknum Kades itu diduga sedang ngamar bersama istri orang.

Kendati oknum Kades itu berhasil kabur, namun tidak dengan beberapa barang bukti.

Mobil dinas Desa, Suzuki APV berkulit STNK-nya, dan SIM ditinggalkan oleh oknum Kades asal Lebak itu di hotel.

Kapolsek Cisolok, AKP Aguk Khusaini, membenarkan kejadian tersebut.

Katanya, oknum Kades asal Lebak itu kabur saat hendak diamankan.

"Untuk proses selanjutnya di Polres ya," katanya saat dihubungi, Jumat (7/7).

Diungkapkan Aguk, penanganan kasus itu hanya sementara di Polsek Cisolok.

"Untuk sementara saja, selanjutnya ada di Polres Sukabumi," ujarnya.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lebak, Usep Pahlaludin, membenarkan kejadian tersebut.

"Tetapi kita akan mengecek kembali informasi tersebut," katanya saat dihubungi.

Ditambahkannya, saat ini pihaknya akan mendalami kebenaran kabar tersebut.

"Kami masih medalami terkait dengan kabar penggerebekan oknum Kades tersebut," ucapnya. ● pra

Sekda Tangerang: Penyederhanaan Birokrasi Pangkas Urusan Berjenjang

TANGERANG (IM) - Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarnan mengatakan penyederhanaan birokrasi bertujuan memangkas birokrasi yang panjang dan berjenjang agar menjadi dinamis.

"Birokrasi yang semula berjenjang mengakibatkan pengambilan keputusan lambat, berubah menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih prima," kata Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarnan di Tangerang, Jumat (7/7).

Selain itu, penyederhanaan birokrasi dapat memberikan perubahan di berbagai aspek birokrasi di antaranya kelembagaan, SDM hingga ketatalaksanaan.

"Ini menuntut struktur birokrasi yang lebih ramping, penambahan kompetensi fungsional, hingga diperlukan perubahan pola kerja dengan budaya kerja berbasis kolektivitas dan membangun team work yang lebih solid," katanya.

Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi, sosialisasi dan diseminasi yang jelas untuk kebijakan ini agar terwujud satu pemahaman dalam mencapai peningkatan kinerja organisasi serta sistem kerja yang lebih lincah.

"Dengan menekankan pada kerja tim, maka dampak positifnya pejabat pimpinan tinggi akan secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi, dialog kinerja, dan meningkatkan kolaborasi serta komunikasi antarsesama unit sehingga proses pengambilan keputusan lebih cepat," ujarnya.

Sekda Herman berharap dengan adanya Peraturan Wali Kota Tangerang No. 12 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah ini dapat meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) menjadi lebih prima. Selain itu, kebijakan ini juga terkait Peraturan Menpan-RB No. 7 Tahun 2022 tentang sistem kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. ● pp

DPRD Dukung Wali Kota Serang Tahap SK PPPK Domisili Luar Daerah

SERANG (IM) - DPRD Kota Serang mendukung kebijakan Wali Kota Serang, Syafrudin untuk menahani Surat Keputusan (SK) 50 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkot Serang.

Menurut DPRD, keputusan Wali Kota Serang sudah tepat, lantaran Pemerintah Pusat juga disebut telah memberikan kewenangan terkait teknis penerimaan PPPK kepada pemerintah daerah masing-masing.

Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri mengatakan, kebijakan Pemkot Serang dalam penahanan SK PPPK itu dinilai wajar, selama tidak ada larangan dari Pemerintah Pusat maupun dari Kementerian, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Artinya mengenai kebijakan disesuaikan dengan yang diberlakukan oleh kabupaten/kota. Jadi, saya setuju saja atas keputusan pak wali, tapi itu kebijakan daerah. Selama tidak ada larangan, menurut saya wajar dan sah saja," ujarnya, kemarin.

Hasan menjelaskan, jumlah kuota penerimaan PPPK di setiap kabupaten/kota akan berbeda, hal ini mengacu pada kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hasan juga menilai wajar dengan kebijakan Wali Kota Serang meminta agar sebanyak 50 PPPK yang lolos untuk pindah domisili ke Kota Serang.

"Alasan teknis kalau misalnya mereka tinggal di luar daerah Kota Serang tentu akan memengaruhi kinerja mereka. Saya kira setuju saja,

karena penerimaan PPPK itu berdasarkan kekuatan anggaran dan diserahkan kepada daerah. Logikanya, diprioritaskan untuk yang berdomisili di Kota Serang," katanya.

Kendati demikian, penahanan SK PPPK, lanjut Hasan, tidak ada kaitannya terhadap politik saat ini. Apabila melihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Serang, secara teknis hal tersebut sesuai dengan aturan dan alasan yang tepat.

"Apapun bisa ditendahkan ke arah politik. Tapi, proporsional saja kalau pun ingin menambah pemilih, itu tidak terlalu signifikan kecuali mencapai ribuan. Jadi, jangan selalu dikaitkan dengan politik," ucapnya.

Selain itu, Hasan menuturkan, sejauh kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Serang tak berbenturan dengan Pemerintah Pusat, hal tersebut masih di batas wajar.

"Kecuali tidak ada aturan dari pemerintah pusat namun ada larangan hal itu tentu tidak diperbolehkan. Jadi kalau tidak ada larangan, sekalipun tidak ada aturannya, itu dikembalikan lagi ke kebijakan daerah," katanya.

Senada dengan Hasan, Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi juga mengatakan, kebijakan itu masih dinilai wajar apabila tidak menyalahi aturan dari pemerintah pusat terkait penahanan SK PPPK.

"Saya juga setuju. Karena prioritas dan sistem penggajian PPPK dibebankan ke APBD. Artinya mereka yang lolos harus mengikuti aturan daerah," ucapnya. ● pra



PEMBANGUNAN STADION DI JAMBI

Foto udara pembangunan stadion (kanan) di samping Taman Pijoan (kiri), Muaro Jambi, Jambi, Jumat (7/7/2023). Pembangunan stadion yang menggunakan dana APBD Provinsi Jambi senilai Rp411 miliar lebih itu ditargetkan rampung pada akhir 2024.

2 Ribu Anak di Kab. Tangerang Jadi Yatim Piatu Akibat Covid-19

Ke 2 ribu anak tersebut masih dalam penanganan Dinas Sosial. Jumlah tersebut merupakan akumulasi terakhir di tahun 2022, saat Dinsos memberikan bantuan sosial kepada anak-anak yatim piatu korban Covid-19, seperti bantuan biaya sekolah atau belajar.

TANGERANG (IM)

- Sebanyak 2 ribu anak di Kabupaten Tangerang menjadi yatim piatu akibat terjangkit Covid-19.

Sebagai informasi di Kabupaten Tangerang tercatat 429 jiwa melayang karena pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Aziz Gunawan mengatakan, sedikitnya ada 2 ribu anak yang menjadi yatim piatu di Kabupaten Tangerang yang menerima bantuan.

"Jumlah tersebut merupakan akumulasi terakhir di tahun 2022, saat Dinsos memberikan bantuan sosial kepada anak-anak yatim piatu korban Covid-19," kata Aziz

Gunawan, Jumat (7/7).

Menurut Aziz, 2 ribu anak tersebut masih dalam penanganan Dinas Sosial. Seperti bantuan biaya sekolah atau belajar. Selain itu, Dinsos Kabupaten Tangerang juga masih terus melakukan operasi penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

"Untuk saat ini bentuk bantuan hanya untuk belajar atau sekolah saja. Sementara PMKS atau anjal saat ini ada 50 anak, dan mereka kita berikan pembinaan dan keterampilan, agar mereka memiliki skill, sehingga tidak dijajalan saja," ungkapnya.

Saat disinggung, terkait tempat rehabilitasi PMKS atau anjal. Aziz mengatakan,

bahwa saat ini pihaknya hanya memiliki satu lokasi UPTD rehabilitasi.

Namun, untuk menanggulangi atau merehabilitasi anak terlantar, ODGJ, dan lansia, pihaknya telah bekerja sama dengan 30 lembaga kesejahteraan sosial di Kabupaten Tangerang. Menurut dirinya, Pemerintah Kabupaten Tangerang wajib hadir untuk anak-anak yatim piatu, khususnya mereka yang memiliki ekonomi yang rendah.

"Untuk tempat rehab yang kita miliki memang hanya satu. Tetapi, kita telah bekerja sama atau mitra dengan 30 lembaga LKS. Jadi kita suport bulannya," ujarnya.

Menanggapi ribuan anak yatim akibat Covid-19 di

Anggota Komisi II Kabupaten Tangerang, Ahyani mengatakan, bahwa pendidikan sangatlah penting bagi anak-anak dan generasi penerus bangsa, khususnya di Kabupaten Tangerang.

Menurut dirinya, Pemerintah Kabupaten Tangerang wajib hadir untuk anak-anak yatim piatu, khususnya mereka yang memiliki ekonomi yang rendah.

"Memang yang terpenting itu pendidikan. Pemerintah harus hadir, kalau bisa menggratiskan seluruh biaya pendidikan, khususnya ketika mereka masuk di sekolah swasta," katanya.

Selain itu, dirinya juga mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki perda CSR yang diberlakukan kepada sekolah-sekolah swasta yang bonafit. Di mana, mereka wajib menampung anak-anak miskin terutama yatim piatu di Kabupaten Tangerang, sedikitnya 10 hingga 20 persen disetiap rombel.

"Lembaga pendidikan harus kena juga, jangan hanya diberlakukan untuk perusahaan. Khususnya, sekolah swasta bonafit, mereka wajib menampung anak-anak miskin terutama yatim piatu, sedikitnya 10 hingga 20 pers-

Cegah Antraks, Pemkot Tangerang Tutup Pengiriman Ternak dari Gunung Kidul

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) memperketat masuknya pengiriman hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba, dari daerah Gunung Kidul yang merupakan wilayah terjangkit antraks.

"Dengan adanya kasus di Gunung Kidul, kami menutup pengiriman hewan dari daerah Gunung Kidul agar tidak menyebar hingga Kota Tangerang," kata Kepala Bidang Pertanian DKP Kota Tangerang, drh. Ibnu Ariefyanto, di Tangerang Jumat (7/7).

Beberapa waktu lalu di wilayah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terdapat kasus antraks dan menjangkit 87 warga, satu diantaranya meninggal dunia.

Ibnu Ariefyanto mengatakan hingga kini kasus antraks di Kota Tangerang tidak ditemukan, apalagi kota itu bukan wilayah yang memiliki banyak peternak. Namun, pembatasan hewan

yang masuk harus dilakukan guna mengantisipasi penyebaran antraks.

"Di Kota Tangerang sendiri kasus antraks nol dan belum pernah ditemukan. Saat idul Adha lalu, kebanyakan hewan kurban yang ada di Kota Tangerang didatangkan dari Bima dan Alhamdulillah bebas dari antraks. Saat ini di Kota Tangerang sendiri ada sekitar 40 peternak," katanya menambahkan.

Ia melanjutkan virus antraks bersifat zoonosis atau dapat menular kepada manusia. Penularan dapat melalui kulit, pernapasan, hingga organ pencernaan, apabila mengonsumsi daging dari hewan yang positif antraks.

Hewan yang terpapar antraks, lanjutnya, tidak boleh dikonsumsi. Solusinya, hewan yang terpapar antraks harus langsung dimusnahkan dengan cara dikubur sedalam dua meter dan dibakar.

"Tidak boleh ada proses penjembutan karena darah hewan yang terpapar antraks itu sangat kuat dan dapat ber-

tahan 50 hingga 75 tahun," katanya menegaskan.

Diharapkan masyarakat untuk tidak panik karena daging sapi yang dijual di Kota Tangerang rata-rata adalah sapi impor dan bukan dari wilayah yang terjangkit antraks.

Bagi para peternak, apabila menemukan hewan ternak mereka yang mati mendadak dan mengeluarkan darah dari mata, hidung, mulut, dan anus, dapat segera menghubungi DKP Kota Tangerang untuk melakukan pengecekan lab dan bantuan untuk pemusnahan hewan.

"Jika ditemukan hewan yang sakit dan mati secara mendadak dapat menghubungi kami untuk dicek melalui lab apakah hewan tersebut terjangkit antraks. Selain itu, jangan lupa isolasi hewan yang sakit atau pisahkan tempatnya dari hewan yang masih sehat untukantisipasi penularan ke hewan yang lain," pungkas Ibnu Ariefyanto. ● pp

Antisipasi Hoaks di Tahun Politik, Ini Langkah Pemkab Serang

SERANG (IM) - Menjelang tahun politik, biasanya ada banyak informasi-informasi yang sengaja diciptakan untuk memuluskan kepentingan seseorang.

Bahkan, tak sedikit juga informasi-informasi yang beredar tersebut merupakan informasi yang telah usang bahkan informasi bohong atau biasa di sebut dengan informasi hoaks.

Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, tak terkecuali pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.

Dalam hal tersebut, Pemkab Serang Serang melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) Kabupaten Serang melakukan upaya serius agar informasi hoaks tidak menyebar di masyarakat.

Kepala Diskominfosatik Kabupaten Serang, Haerofiatna mengatakan, hoaks harus ditangani sesius apalagi menjelang tahun politik.

"Bahaya hoaks sangat luar biasa, apalagi mereka yang minim literasi. Tentunya ini akan berdampak seperti tahun lalu, masyarakat di kotak-kotakan dan dampaknya luar biasa banyak hal negatif yang ditimbulkan," katanya, Jum'at (7/7).

Dia mengatakan, dalam upaya penanganan informasi hoaks di Kabupaten Serang, ada hal yang sangat penting yang harus terlebih dahulu dilakukan.

"Kami saat ini telah menggalakan literasi digital kepada masyarakat, memudahkan di tahun ini di perubahan kita turun lagi ke lapangan," katanya.

Saat ini sudah terbentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang bertugas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai literasi digital.

"Seringkali masyarakat hanya melihat judulnya saja tapi tidak dengan isinya, sehingga terkadang salah menangkap informasi," jelasnya.

Nantinya, KIM akan melakukan sosialisasi dan pemahaman mengenai bagaimana cara untuk melakukan pengecekan terhadap informasi yang diterima.

"Masyarakat juga harus tahu darimana informasi berasal, sumbernya dari mana, isinya seperti apa fakta atau justru hoaks," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga berencana akan membentuk tim khusus yang nantinya akan melakukan penanganan terhadap berita-berita hoaks.

"Kita akan membentuk tim yang akan mengontrol yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Kementerian maupun pihak kepolisian siber. Yang akan kita hadapi kan buzer bukan netizen, untuk itu kita harus pandai-pandai untuk mengelola informasi ini," pungkasnya. ● pra



PENGAMBILAN SAMPEL DARAH KASUS ANTRAKS GUNUNGKIDUL Petugas Dinas Kesehatan Gunungkidul mengambil sampel darah Pedukuhan Jati, Candirejo, Semanu, Gunungkidul, DI Yogyakarta, Jumat (7/7). Dinas Kesehatan Gunungkidul melakukan pengambilan sampel darah untuk mencegah meluasnya penularan penyakit antraks setelah satu orang meninggal dunia dan 87 warga Candirejo positif setelah mengkonsumsi daging sapi yang terpapar antraks.